

# DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Manokwari)

Ambar Utari Maharani <sup>1</sup>, Marlina Malino <sup>2\*</sup>, Verawati Simanjuntak <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Papua, Manokwari

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of clarity of budget target, budget participation, accounting control, and reporting systems on accountability performance of government agency at regional apparatus organizations (OPD) in Manokwari. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires to respondents, namely employees who know and be involved in the preparation of financial reports on 24 OPD. The research respondents obtained were 60 respondents. The results showed that the clarity of budget targets and budgetary participation did not affect the accountability of the performance of government agency, while accounting controls and reporting systems had a significant effect on the performance accountability of government agency.*

**Keywords:** *Clarity of Budget Target, Budget Participation, Accounting Control, Reporting System, Performance Accountability of Government Agency*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Manokwari. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu pegawai yang mengetahui dan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada 24 OPD. Responden penelitian yang diperoleh adalah berjumlah 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Kata Kunci:** Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

---

\*Corresponding Author e-mail: : m.malino @unipa.ac.id

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas bisa diartikan sebagai bentuk tanggungjawab dari instansi pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk pelaporan yang berisi tentang kegiatan yang telah terlaksana dalam kurun waktu satu tahun. Wujud pertanggungjawaban tentang kinerja instansi pemerintah kepada publik terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun yang akan datang, dimana dalam LAKIP terdapat gambaran kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dari tiap-tiap perangkat daerah. Dalam LAKIP terdapat gambaran tentang penerapan prinsip *good governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah (Kaltsum, dkk., 2014). Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci tata kelola yang baik dalam organisasi publik. Keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya dinilai dari proses pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas kinerja juga termasuk dalam dasar hukum dan/atau aturan organisasi (Isnanto, dkk., 2019).

Kejelasan sasaran anggaran menjadi salah satu hal yang penting karena memiliki dampak yang cukup besar terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran bisa diartikan sampai mana tujuan anggaran dapat diterima secara jelas dan terarah dengan tujuan agar mudah dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas anggaran tersebut. Sasaran anggaran yang tidak jelas bisa membuat gagal pelaksanaannya dikarenakan bingung dan tidak puas dengan apa yang dikerjakan. Menurut Anjarwati (2021), kejelasan sasaran anggaran dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mempermudah pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam sasaran organisasi maka dibutuhkan sasaran anggaran yang jelas. Tidak hanya kejelasan sasaran anggaran, tetapi partisipasi penyusunan anggaran juga termasuk indikator untuk menilai akuntabilitas kinerja. Dalam partisipasi penyusunan anggaran ini, dibutuhkan kerjasama yang baik antara staf dan manajer terhadap target sasaran anggaran yang ingin dicapai.

Selain itu, tugas manajer dalam pembuatan keputusan, mengontrol operasi, serta mampu mengestimasi biaya dan memperkirakan keberhasilan dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja operasi dapat dibantu oleh penggunaan sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi merupakan semua prosedur dan sistem penggunaan formal informasi untuk memelihara dan memodifikasi pola organisasi. Sistem akuntansi yang dimanfaatkan untuk pengendalian keuangan merupakan contoh dari pengendalian manajemen yang baik. Sedangkan pengendalian manajemen dapat dikatakan baik jika pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif, efisien, dan adil (Hafzhan, 2021).

Pratama (2019) mengatakan bahwa instansi pemerintah dapat menilai dan mengontrol semua tanggungjawab dan aktivitas yang dilakukan instansi tersebut dengan mengandalkan pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi juga digunakan untuk menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan

oleh instansi pemerintah daerah telah efektif, efisien, adil, dan merata pelayanannya kepada masyarakat. Prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah dengan tercapainya faktor tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik jika pengendalian akuntansi yang diterapkan juga baik.

Selain kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan pengendalian akuntansi yang telah dijelaskan di atas, sistem pelaporan juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan berisi pertanggungjawaban kewajiban representasi dan laporan kinerja seluruh aktivitas dan sumber daya. Sistem pelaporan yang baik dipergunakan untuk memantau dan menuntun kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang ada (Precelina, 2019). Menurut Hidayattullah & Herdjiono (2015), pemerintah selaku pengelola dana publik diwajibkan untuk bisa menyediakan informasi keuangan secara relevan, akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyampaikan bahwasanya laporan yang baik adalah laporan yang sudah disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, perlu dilakukannya pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pemeriksaannya, BPK memberikan penilaian berupa opini/pendapat atas kewajaran informasi dalam laporan keuangan tersebut. Allorante (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila laporan keuangan pemerintah dinilai baik maka seharusnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerjanya juga baik. Hal ini dapat terjadi karena perencanaan kinerja dan capaian kinerja merupakan komponen penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan keuangan dan anggaran.

Penelitian terkait kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu Hafzhan (2021), Allorante (2021), dan Amalia (2017). Penelitian Hafzhan (2021) menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan Allorante (2021) menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Amalia (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hafzhan (2021) dengan judul pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPKAD kota medan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menambahkan satu variabel yakni partisipasi anggaran. Perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini menggunakan sampel dari 27 OPD di Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikembangkan maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: (1) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?; (2) Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?; (3) Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?; (4) Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai referensi untuk menganalisis tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maupun akuntansi sektor publik lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah dan memperluas pengetahuan tentang hal-hal yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberi masukan bagi OPD kabupaten manokwari untuk menerapkan kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran dengan jelas dan baik agar tetap terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dalam penelitiannya Hafzhan (2021) mengatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya misi organisasi dalam mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam sistem akuntabilitas secara berkala. Perwujudan pertanggungjawaban itu kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tertulis bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi : (1) rencana strategis; (2) perjanjian kinerja; (3) pengukuran kinerja; (4) pengelolaan data kinerja; (5) pelaporan kinerja; (6) revidi dan evaluasi kinerja.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Anggaran memiliki peranan yang penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran di sisi lain juga dapat digunakan untuk menentukan apa yang akan dilakukan di masa depan. Menurut Precelina (2019),

kejelasan sasaran anggaran merupakan keluasan sasaran anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik serta dapat dipahami oleh individu yang bertanggungjawab atas pencapaiannya. Oleh karena itu, pengaruh individu dalam menetapkan tujuan anggaran dapat mengungkapkan kejelasan target anggaran. Menurutnya, pelaksanaan anggaran dapat memberikan reaksi yang positif dan baik jika sasaran anggarannya juga jelas.

### **Partisipasi Anggaran**

Anggaran merupakan dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh setiap unit kerja di suatu instansi berdasarkan surat edaran dari tim anggaran (Mardiasmo, 2002). Sementara Supomo dan Idriantoro (1998) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan metode yang melibatkan orang dalam pembuatan target anggaran, kemudian orang tersebut dinilai atas kinerjanya dan diberikan penghargaan berdasarkan target anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki manfaat mendorong manajer lini untuk mengambil inisiatif, mendorong peningkatan moral, dan memfasilitasi aliran informasi yang efisien antara pembuat anggaran dan pelaksana.

### **Pengendalian Akuntansi**

Pengendalian akuntansi yaitu prosedur yang membatasi dan mengarahkan tindakan pemrosesan data keuangan dengan tujuan untuk menghindari atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan (Carter, 2009). Sedangkan menurut Hafzhan (2021) pengendalian akuntansi mencakup seluruh struktur organisasi serta setiap prosedur yang terutama berkaitan dan terhubung dengan perlindungan aset perusahaan dan keakuratan data keuangan. Pengendalian akuntansi dapat membantu menjamin bahwa dilakukan standar pencatatan yang sesuai untuk setiap transaksi keuangan sehingga kesalahan pencatatan dapat diminimalkan.

### **Sistem Pelaporan**

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003), sistem pelaporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Teori Stewardship**

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *stewardship* adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa manajer dimotivasi oleh tujuan akhir utama mereka untuk kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Dalam pemerintahan menerapkan teori *stewardship*, dimana rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*. Pemerintah selaku *steward* akan berusaha bertindak untuk kepentingan

bersama, karena *steward* lebih mengutamakan kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik yang merupakan pertimbangan rasional.

### **Pengembangan Hipotesis**

Anggaran daerah harus dapat dijadikan sebagai standar kinerja yang diharapkan. Pada anggaran perlu diketahui tentang kejelasan sasaran anggaran agar dapat memudahkan seseorang untuk membuat target anggaran. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditentukan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan jika ada kejelasan sasaran anggaran yang ditetapkan (Wea, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan hasil penelitian Afrida (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 1 pada penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub> : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Falikhatusun (2007) menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi memiliki hubungan yang baik dengan keterlibatan bawahan dalam perumusan anggaran, karena setiap pimpinan memiliki kesempatan untuk menawarkan perincian tentang tanggungjawabnya. Dalam hal ini berarti bahwa keikutsertaan pegawai dalam penyusunan anggaran diharapkan dapat bertanggungjawab pada anggaran yang telah disusun dan meraih tujuan kinerja untuk mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Teori *stewardship* mendukung adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, dimana pemerintah (*steward*) berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan adanya partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran sebagai wujud tanggungjawabnya kepada publik (*principal*). Hasil penelitian Allorante (2021) menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan hasil dari penelitian Beny Arifin (2012) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 2 yaitu:

H<sub>2</sub> : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Eksekusi kinerja keuangan yang baik akan diatur melalui pengendalian akuntansi yang baik guna memudahkan proses pengambilan keputusan. Pengendalian akuntansi juga menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini termasuk dalam penunjang untuk tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya teori *stewardship* dalam

pengendalian akuntansi yaitu adanya pengendalian akuntansi yang baik diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat menjadi bukti pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Hasil dari penelitian Anastasia (2018) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan hasil dari penelitian Amalia (2017) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 3 yaitu:

H<sub>3</sub> : Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengawasi kinerja instansi dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Sistem pelaporan mengurangi tingkat ambiguitas terkait dengan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, dan secara positif memengaruhi perilaku pengambil keputusan sehingga akuntabilitas terpenuhi (Kusumaningrum, 2010). Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan publik harus bisa menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat diandalkan. Hal ini berkaitan dengan teori *stewardship* dimana pemerintah sebagai lembaga yang dapat diandalkan bagi publik. Isnanto, dkk. (2019) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan hasil penelitian Anastasia (2018) menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 4 yaitu:

H<sub>4</sub> : Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada OPD di Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Agustus 2022 – 9 September 2022. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu kuesioner. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 27 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari yang terdiri dari 1 inspektorat, 17 Dinas, 6 Badan, 1 Satpol PP, 1 PDAM, 1 RSUD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Manokwari yang mengetahui dan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam penelitian ini kuesioner yang terdistribusi sebanyak 3 x 24 OPD yaitu 72 kuesioner dan dari 72 kuesioner tersebut yang diterima kembali dan dapat diolah sesuai kriteria sejumlah 60 kuesioner (83%).

### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai *r* hitung dan *r* tabel dari masing-masing item pernyataan. Pada penelitian ini seluruh butir pernyataan memiliki nilai *r* hitung > *r* tabel, maka dapat dikatakan valid. Uji reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach Alpha*, hasil uji menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* tiap variabel > 0,60 maka seluruh variabel dapat dikatakan reliabel.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Test*. Hasil menunjukkan nilai signifikansi 0,200 > 0,05, maka data yang digunakan telah terdistribusi normal.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		60
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,99053315
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,089
	<i>Positive</i>	0,089
	<i>Negative</i>	-0,081
<i>Test Statistic</i>		0,089
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200

Sumber: data diolah SPSS 25, 2022.

### Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,354	2,824
Partisipasi Anggaran (X2)	0,517	1,932
Pengendalian Akuntansi (X3)	0,419	2,368
Sistem Pelaporan (X4)	0,576	1,735

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil pada nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka seluruh variabel tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *Glejser*. Berikut adalah hasil pengujiannya.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	T	Sig.
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	-0,654	0,516
Partisipasi Anggaran (X2)	0,242	0,810
Pengendalian Akuntansi (X3)	0,950	0,346
Sistem Pelaporan (X4)	-1,332	0,188

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel > 0,05, maka tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	5,464	3,894		1,403	0,166
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,057	0,205	0,038	0,279	0,782
Partisipasi Anggaran	-0,064	0,157	-0,045	-0,405	0,687
Pengendalian Akuntansi	1,008	0,235	0,532	4,287	0,000
Sistem Pelaporan	0,726	0,209	0,367	3,472	0,001

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di atas, dapat dibuat suatu model persamaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

$$Y = 5,464 + 0,057X1 - 0,064X2 + 1,008X3 + 0,726X4 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: nilai konstanta bernilai positif yaitu 5,464. Nilai koefisien X1 sebesar 0,057, artinya jika X1 mengalami kenaikan maka Y mengalami peningkatan sebesar 0,057 atau 5,7%. Nilai koefisien X2 sebesar -0,064, artinya jika X2 mengalami kenaikan maka Y mengalami penurunan sebesar 0,064 atau 6,4%. Nilai koefisien X3 sebesar 1,008, artinya jika X3 mengalami kenaikan maka Y mengalami peningkatan sebesar 1,008 atau 100,8%. Nilai koefisien X4 sebesar 0,726, artinya jika X4 mengalami kenaikan maka Y mengalami peningkatan sebesar 0,726 atau 72,6%.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah secara keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Simultas (Uji F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	959,329	4	239,832	24,999	0,000
Residual	527,654	55	9,594		
Total	1486,983	59			

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka secara keseluruhan variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

### Uji Koefisien Determinan

Uji determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,803	0,645	0,619	3,09737

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil nilai *Adjusted R Square* 0,619 sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel X dapat menjelaskan kecenderungan kinerja variabel Y sebesar 0,619 atau 61,9% dan sisanya 38,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05. Berdasarkan pada tabel 4 maka dapat disimpulkan hasil uji t sebagai berikut:

- a. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar 0,279 dan nilai signifikan 0,782. Oleh karena itu nilai signifikan  $0,782 > 0,05$  maka H1 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y.
- b. Variabel partisipasi anggaran (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar -0,405 dan nilai signifikan sebesar 0,687. Oleh karena itu nilai signifikan  $0,687 > 0,05$  maka H2 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y.
- c. Variabel pengendalian akuntansi (X3) mempunyai nilai t hitung sebesar 4,287 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Oleh karena itu nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka H3 diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap Y.
- d. Variabel sistem pelaporan (X4) mempunyai nilai t hitung sebesar 3,472 dan nilai signifikan sebesar 0,001. Oleh karena itu nilai signifikan  $0,001 < 0,05$  maka H4 diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap Y.

### Pembahasan

1. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai t hitung sebesar 0,279 dan nilai signifikan sebesar  $0,782 > 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafzhan (2021) dan Afrida (2017) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017). Dengan adanya hasil yang belum konsisten antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menandakan bahwa masih terdapat sasaran anggaran yang kurang jelas. Hal ini bisa disebabkan dari pelaksanaan anggaran yang belum jelas dan tidak adanya kepuasan dalam bekerja, maka dari itu bisa terjadinya penurunan akuntabilitas kinerja. Jika adanya sasaran anggaran yang jelas, maka dapat

mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi tersebut.

2. Hasil hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran memiliki nilai t hitung sebesar -0,405 dan nilai signifikan sebesar  $0,687 > 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Allorante (2021). Dengan adanya hasil yang tidak signifikan tersebut berarti bahwa partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana jika semakin sering pegawai terlibat dalam penyusunan anggaran tidak selalu menunjukkan hasil kinerja yang baik dan begitupun sebaliknya jika semakin jarang pegawai terlibat dalam penyusunan anggaran tidak selalu menunjukkan hasil yang buruk. Hasil ini tidak sesuai dengan teori *stewardship*, dimana akuntabilitas kinerja yang baik diharapkan dapat terjadi jika adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran.
3. Hasil hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi memiliki nilai t hitung sebesar 4,287 dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anastasia (2018), Isnanto, dkk (2019), dan Hafzhan (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Manokwari telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, semakin baik pengendalian akuntansi yang diterapkan maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Salah satu contoh penerapan pengendalian akuntansi yang baik pada OPD Kabupaten Manokwari yaitu audit atau pemeriksaan internal digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan dan seluruh transaksi yang dilakukan harus didukung dengan bukti yang sah dan valid. Dengan adanya pengendalian akuntansi yang baik, maka akan mampu menciptakan proses kinerja yang baik sehingga dapat memaksimalkan efisiensi dan efektifitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian akuntansi akan memberikan dampak positif dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang mana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan transparansi dan keefektifan kerjanya kepada publik.
4. Hasil hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan memiliki nilai t hitung sebesar 3,472 dan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnanto, dkk. (2019),

Allorante (2021), dan Hafzhan (2021) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan pada OPD Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan dengan baik, hal ini bisa didasarkan pada pemahaman peranan dan tujuan laporan keuangan, informasi yang disajikan pada laporan keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship*, karena dengan adanya sistem pelaporan yang baik maka pemerintah (*steward*) bisa menunjukkan kinerja yang baik juga kepada publik (*principal*).

## KESIMPULAN

Independensi, keahlian audit, dan lingkup audit berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan di BPK RI Perwakilan Papua Barat, artinya bahwa opini yang dihasilkan atas sebuah laporan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, tidak terikat oleh pihak manapun, dan sepenuhnya untuk kepentingan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam menjalankan tugasnya auditor telah memiliki keahlian audit yang memadai agar opini yang dihasilkan akan lebih tepat dan akurat sehingga tidak menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan. Lingkup audit berkaitan dengan pemeriksaan audit dalam mengumpulkan bukti-bukti audit yang mana berkaitan langsung dengan tujuan dari audit tersebut. Adanya pembatasan terhadap lingkup audit baik yang dilakukan oleh klien maupun keadaan lain seperti batas waktu pemeriksaan, kegagalan memperoleh bukti yang cukup dan lain-lain akan mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independent dalam penelitian yaitu variabel keahlian audit dan lingkup audit, sehingga untuk penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan cara menambah beberapa variabel–variabel lain di luar penelitian ini, seperti: *judgment*, konsistensi dalam penerapan PABU dan lain-lain. Dengan menggunakan metode analisis yang berbeda dan populasi yang berbeda agar dapat di peroleh hasil yang berbeda pula.

## DAFTAR REFERENSI

Arens, alvin A. Elder, Randal J. Beasley, Mark S. 2008. *Auditing dan jasa Assurance*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasyim, Wahid, 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam pemberian Opini Audit atas Laporan Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan). Skripsi tidak dibuplikasi. Universitas Hasanudin.
- [Http://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorial/2638-opini-semu-auditor-bpk](http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorial/2638-opini-semu-auditor-bpk)
- Jaafar, H.T Redwan dan Sumiyati. 2005. *Kode Etik dan Standar Audit, Diklat pembentukan auditor terampil, pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP*. Jakarta.
- Konrath. 2005. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. Jakarta: Selemba Empat.
- Mayangsari, Sekar. 2003. "Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap pendapat audit: sebuah kuasai Eksperimen". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. 6 (1:1-23). Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua : Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Puublik*. Edisi Kedua: Yogyakarta.
- Mulyadi. 2011. *Auditing Buku 1*. Jakarta: Selemba Empat.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Prasetianto, Iwan Antonius, 2011. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Hasil Opini Audit (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- Siregar, Silky Raditya. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Suartana, Wayan. 2010. *Akuntansi keperilakuan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Swarjana, I. K., & SKM, M. (2022). *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*. Penerbit Andi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Unisa, Arta Ifany. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit laporan keuangan (studi pada auditor di BPK perwakilan Provinsi Riau). Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Riau.